

ORANG BADUY DALAM LINTASAN POLITIK INDONESIA

MOH. ALI B. DAHLAN

Rektor Universitas Gunung Rinjani
Selong-Lombok Timur

Email: alibd@univgunungrinjani.ac.id

ABSTRAK

Dalam jangka waktu 40 tahun sejak 1978, kelompok Baduy ini telah banyak mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada penguasaan ekonomi pasar dan perdagangan umum. Kelompok ini juga bersentuhan dengan aktifitas politik praktis. Kelompok ini juga yang ikut mempengaruhi orang Baduy (buyut) untuk terlibat dalam pemilihan umum (Pemilu). Masyarakat Baduy di desa Kenekes, Kecamatan Leuwidamar Banten, sejak lama membangun sistem pemerintahan sendiri dalam kerangka negara yang lebih luas di atasnya. Walaupun demikian, mereka tetap mematuhi nilai-nilai yang sudah ada dari buyut mereka. Walaupun masyarakat Baduy belum mendapatkan pendidikan formal dari pemerintah, mereka belajar dengan caranya sendiri untuk dapat memahami perkembangan diluar desanya seperti penggunaan bahasa Indonesia dan pengenalan handphone secara terbatas. Proses perubahan itu berjalan lebih cepat setelah kawasan Baduy menjadi cagar budaya yang banyak dikunjungi turis asing dan domestik. Masyarakat Baduy melihat segala aktifitas politik selama tidak menyentuh nilai-nilai Baduy, dipandang sebagai bagian ketaatan kepada pemerintah yang menjadi bagian penting dari kehidupan tradisional Baduy. Walaupun sudah terjadi berbagai perubahan dalam kaitannya dengan hubungan timbal balik antara masyarakat Baduy dan bukan Baduy, diharapkan pemerintah memberikan proteksi terhadap keberlangsungan ekonomi dan sosial masyarakat Baduy.

Kata Kunci : orang Baduy, Lintasan Politik

ABSTRACT

In a period of 40 years since 1978, it has been widely applied to groups experiencing significant changes, especially on the mastery of the market economy and general trading. The group is also contact with the practical political activities. This group also affects people who Applied (great-grandson) to engage in public pamilihan (elections). Baduy community in the village of Kenekes, district Lewidamar, since a long time to build the system of self-government in the framework of the wider State of it. Nevertheless, they continue to adhere to the values that already exist from their great-grandfather. Although the community is not yet applied to get formal education from the Government, they learn in its own way to be able to understand the developments outside his village as the use of the language of Indonesia and the introduction of mobile phones to a limited extent. The process of changing it runs faster after the area Baduy became a cultural reserve visited foreign and domestic tourists. Baduy community political activities see all for not touching the value applied to value, are seen as part of the Government's obedience to become an important part of traditional life are applied. Despite numerous changes occurred in relation to the reciprocal relationship between the communities are applied and not applied to the Government, is expected to provide protection against economic and social sustainability of the Baduy society.

Keywords: Baduy people, the political Trajectory

PENDAHULUAN

Istilah atau sebutan orang Baduy, walaupun telah lama dikenal, namun diskusi mengenai nama orang Baduy khususnya dikalangan akademisi masih tetap menarik untuk dibahas. Tulisan ini tidak akan membahas secara luas tentang asal kata Baduy. Akan tetapi saya telah memutuskan nama Baduy adalah panggilan yang didasarkan dari nama lokasi yang lebih tua dalam wilayah tanah ulayat orang Baduy, yakni Gunung Baduy yang letaknya tidak jauh dari kampung yang terletak dalam wilayah Baduy Luar, yakni kampung Kaduketuk dan Cihulu. Di areal sempit, di sepanjang Kali Ciujung bermukim sebagian besar masyarakat yang disebut orang Baduy.

Para peneliti, membagi Baduy menjadi dua bagian yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam terdiri dari tiga kampung, Cibeo, Cikertawana dan Cikeusik (3C). Baduy Dalam juga disebut tangtu, sedangkan Baduy Luar disebut Panamping. Baduy Dalam dianggap sebagai pusat pemerintahan tradisional Baduy. Juga sebagai pusat kebudayaan dan tempat suci orang Baduy. Orang dari Baduy Dalam dapat dilihat dari warna pakaian khas yang menempel pada badanny berupa ikat kepala dari kain putih hasil tenunan ibu rumah tangga Baduy.

Saya membagi masyarakat Baduy menjadi empat kelompok berdasarkan sistem pemukiman tetap masyarakat dan latar belakang sosial yang terbaru. Pertama, mereka yang tinggal di pusat desa (3C) sebagai Baduy Dalam (tangtu). Kedua, mereka yang tinggal didalam desa Kenekes, tetapi diluar 3C, kita sebut sebagai Baduy Luar (Panamping). Ketiga Baduy Dangka adalah orang Baduy yang berada diluar tanah ulayat Baduy, seperti yang bermukim di Cibengkung, Sirah Dayeuh, di desa Bojongmenten, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten. Kelompok Baduy keempat saya sebut sebagai Baduy Islam. Istilah ini kurang dikenal dalam literatur Baduy sebelumnya, karena kelompok orang Baduy Islam lahir sejak 1978, ketika pemerintah dengan tafsir yang keliru telah memindahkan sejumlah masyarakat Baduy Luar ke beberapa tempat kosong

disekitar Kecamatan Leuwidamar, seperti di Kopo, Margaluyu, dan kampung Cipengembar. Proyek pemindahan orang Baduy ke daerah baru tapi masih dalam wilayah Leuwidamar, disebut PKMT (pemukiman Kembali Masyarakat Terasing), suatu hal yang saya sebut sebagai kesalahan besar. Orang Baduy bukanlah suku terasing, melainkan kelompok masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang sempurna. Kelompok keempat ini telah banyak memeluk agama Islam, tetapi tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan buyut yang masih menetap di Baduy Luar atau Baduy Dalam.

Kelompok orang Baduy yang telah dipindahkan ke wilayah baru, tapi masih dalam wilayah tanah leluhur orang Baduy dimasa lalu, menjadi penting untuk kita beri catatan. Dari keempat kelompok Baduy, kelompok keempat menjadi pintu masuk perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat Baduy. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: 1. Mereka telah mengganti sistem kepercayaannya (Sunda Wiwitan) menjadi pemeluk agama Islam. 2. Mereka telah mengenyam pendidikan agama dan pendidikan umum, menyebabkan kehidupan sosial mereka lebih terbuka dibandingkan dengan buyut yang masih tinggal di desa asalnya (Kanekes). Dalam jangka waktu 40 tahun sejak 1978, kelompok Baduy ini telah banyak mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada penguasaan ekonomi pasar dan perdagangan umum. Kelompok ini juga bersentuhan dengan aktifitas politik praktis. Kelompok ini juga yang ikut mempengaruhi orang Baduy (buyut) untuk terlibat dalam pemilihan umum (Pemilu). (Moh. Ali B. Dahlan, *Peranan Pemerintah Dalam Memberdayakan Sistem Perdagangan Pada Masyarakat Baduy Di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten*). Dibawah ini adalah peta wilayah desa Kanekes.

(PETA BADUY)



Orang Baduy sendiri tidak menyebut dirinya sebagai Baduy. Mereka menyebut dirinya sebagai urang Kanekes, nama desa untuk semua wilayah ulayat desa Kanekes berdasarkan Pengakuan Pemerintah menunjuk pada Perda Kabupaten Lebak No. 02/2002. Desa Kanekes adalah bagian dari Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Perda tersebut menetapkan luas wilayah tanah ulayat Baduy seluas 5100 Ha, dengan areal pertanian lahan kering seluas 274 Ha sekaligus sebagai areal pemukiman penduduk Baduy yang sangat bersejarah itu. Leuwidamar dimasa kolonial Belanda pernah menjadi pusat pemerintahan Lebak, dimana asisten Residen Lebak Eduward Deuwes Dekkaer seringkali menyaksikan kehidupan sulit masyarakat Banten Selatan. Keadaan tersebut pernah ditulis dalam novel sejarah Max Havelaar (1859) dengan menggunakan nama samaan Multatuli'.

SISTIM PEMERINTAHAN BADUY

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Baduy di desa Kanekes, sangat dipengaruhi oleh dua macam lembaga yang ada hingga dewasa ini. Pertama adalah Pu'un.

Gelar Pu'un adalah fungsionaris tertinggi, menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai Baduy yang telah diturunkan oleh buyut (nenek moyang) yang dituangkan dalam pikukuh yang tidak tertulis, diantaranya adalah tiga belas bait kata kata palsafah Baduy yang sangat dalam kandungan maknanya. Dalam menjalankan tugasnya Pu'un dibantu oleh jaro. Jaro tangtu adalah yang membantu puun dalam wilayah Baduy Dalam, sedangkan jaro dua belas, jaro warega dan jaro dangka. Jaro dangka semacam perwakilan di luar desa Kanekes (Baduy Dangka). Di setiap kampung ada lagi fungsionaris adat yang disebut kokolot.

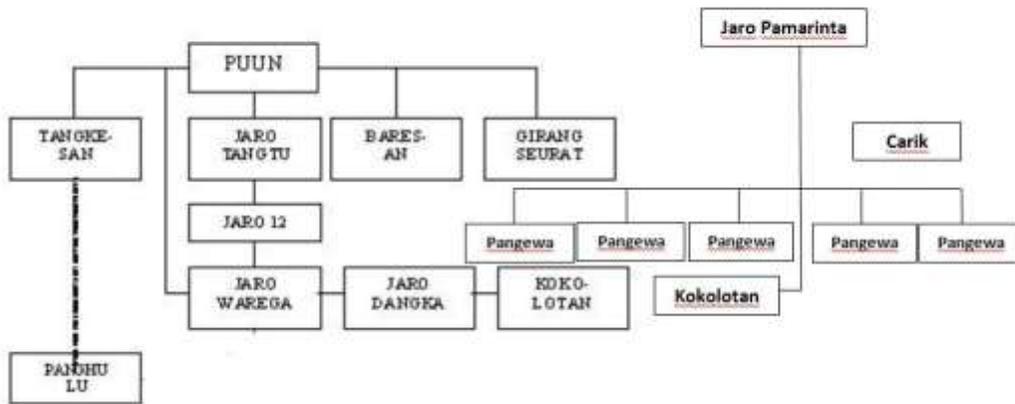
Lembaga adat Baduy hampir tak dapat dipisahkan dengan system pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Pemerintahan di Daerah. Istilah jaro juga berlaku untuk kepala desa, desa Kanekes. Jaro atau Kepala Desa tidak dipilih menurut Undang Undang, akan tetapi berdasarkan keputusan musyawarah Pu'un, jaro dan kokolot Pemerintah Kabupaten Lebak menunjuk seorang Sekretaris Desa dari ASN yang bertugas menjalankan pemerintahan di desa Kanekes sehari-hari. Untuk seorang Sekretaris Desa di desa Kanekes tidak disebut

Sekdes, melainkan dengan nama lokal carik. Jaro atau Kepala Desa di Kanekes tidak dibatasi masa jabatannya. Sebagai contoh Jaro Dainah (65 Thn) telah bertugas lebih dari 15 tahun dan tidak pernah diganti, selama yang bersangkutan tetap digaris adat istiadat Baduy. Jaro yang melambangkan sebagai kepala Desa menurut Undang Undang disebut Jaro pamarentah. Pemerintah menghormati kehidupan budaya Baduy termasuk system pemerintahannya, hal mana sudah sesuai dengan bunyi pasal 18B ayat 1 dan 2, dimana Negara menghormati hukum adat yang masih hidup ditengah masyarakat. Hal tersebut telah dituangkan oleh Undang Undang Pemerintahan Daerah, Undang Undang No.32/2004 pada pasal 203, yang dituangkan melalui Peraturan daerah Kabupaten Lebak No.2/2002 tersebut diatas.

Jaro pamarentah dibantu oleh lima pangewa. Pangewa membantu jaro

berdasarkan kebutuhan, pada umumnya pangewa menjadi kaki tangan Sekretaris Desa. Untuk menjadi jaro atau pangewa, tidak dibutuhkan syarat pendidikan. Mengingat bahwa di Baduy sampai sekarang belum ada sekolah, maka secara formil tidak ada penduduk yang dapat membaca dan menulis. Saya tahu beberapa penduduk dapat membaca dan menulis secara otodidak, juga melalui kader posyandu, seorang bidan mengajar kadernya menulis untuk mengisi kartu peserta posyandu di puskesmas Cisimeut. yang wilayah kerjanya mencakup desa Kanekes, dan desa lain dalam wilayah kecamatan Leuwidamar. Dibawah ini bagan pemerintahan adat dan administrasi pemerintahan desa Kanekes ((Moh. Ali B. Dahlan, *Peranan Pemerintah Dalam Memberdayakan Sistem Perdagangan Pada Masyarakat Baduy Di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten*).

(BAGAN SISTIM PEMERINTAHAN BADUY)



Hubungan kerja langsung antara pemerintah, kabupaten mapun kecamatan sangat terbatas. Hanya carik yang aktif berhubungan dengan pemerintahan diatasnya, baik mengenai administrasi pemerintahan maupun segala program yang ditujukan kepada masyarakat desa. Alasannya sangat sederhana, karena semua fungsionaris pemerintahan di desa Kanekes tidak bisa baca tulis. Akibat dari hal tersebut kemungkinan besar sulit menumbuhkan partisipasi aktif bagi masyarakat Baduy termasuk transparansi program yang digagas oleh pemerintah.

BUDAYA BADUY

Sistim Kepercayaan orang Baduy pada umumnya disebut agama Baduy. Urang Kanekes lebih suka menyebut agamanya sebagai Sunda Wiwitan. Mereka mempercayai supranatural yang mengatur alam semesta. Mereka membuat upacara persembahan kepada Sangyang Sri. Orang Baduy membuat upacara khusus yang bermotif politik, Upacara seba, sebuah pernyataan simbolik terhadap kekuasaan pemerintah.

Urang Kanekes berbahasa Sunda dengan logat yang lebih lamban. Alat musick

Sunda seperti angklung, tenunan Sunda dengan corak khas Baduy dipertahankan sampai sekarang. Tenunan Baduy dimasa lalu dibuat untuk keperluan domestic. Urang Kanekes yang dahulu dijual dengan system barter. Nyanyian Sunda dan mantra dalam bahasa Sunda dipergunakan dalam semua kehidupan dan kepercayaan orang Baduy. Karena itulah saya tidak sependapat jika orang Baduy disebut sebagai suku (*tribe*) Baduy. Saya menyebutnya sebagai orang Baduy sebagai bagian Suku Bangsa Sunda, tetapi mereka memiliki kekhasan terutama budaya. Tabel ini memperlihatkan adanya perbedaan dan persamaan antara Budaya Baduy dan Agama Islam sebagai berikut;

No	Gelar/Sebutan	Islam	Sunda Wiwitan
1	Tuhan	Allah	Guriang Mangtua
2	Nabi Adam	Ada	Ada
3	Nabi Muhammad	Ada	Tidak Ada
4	Penghulu	Ada	Ada
5	Sunat/Khitan	Ada	Ada
6	Amil	Ada	Ada
7	Hari Kiamat	Ada	Ada
8	Sanghiyang Sri	Tidak Ada	Ada
9	Tenunan Suci	Tidak Ada	Ada
10	Haji	Ada	Tidak Ada
11	Tempat Suci Selain Masjid	Tidak Ada	Ada

Dari sebelas unsur yang ditanyakan, hanya lima unsur yang berbeda antara Islam dan Sunda Wiwitan. Walaupun ada unsur persamaan dalam gelar/title fungsionaris agama dan adat Baduy, akan tetapi masih terdapat beberapa perbedaan pada fungsi masing- masing. Seorang amil didalam agama Islam, adalah mereka yang bertugas sebagai pengurus atau membagi zakat, sedang amil dalam Sunda Wiwitan adalah fungsionaris untuk mengurus berbagai upacara yang berkaitan dengan kematian. Tuhan dalam Islam sebagai yang menurunkan perintah dan larangan, berbeda dengan Tuhan dalam Sunda Wiwitan (Baduy) yakni nama yang

*Buyut nu ditipkeun ka puun
Nagara satelung puluh telu
Bangawan sawidak lima
Pancar salawe nagara
Gunung teu meunang dilebur
Lebak teu meunang dirusak*

dan pandangan hidupnya yang senantiasa mempertahankan pikukuh dan pesan buyut.

Walaupun orang Baduy mengaku kepercayaanya sebagai Sunda Wiwitan, akan tetapi beberapa unsur dalam agama Islam dapat terlihat dalam bentuk symbol dan sebutan sebagai fungsionaris agama. Beberapa nama nabi orang Islam juga dikenal dan dipercayai, seperti nabi Adam dan beberapa gelar dalam organisasi agama Islam. Berikut adalah 11 unsur yang saya tanyakan kepada masyarakat Baduy.

harus dihormati melalui berbagai upacara. Pikukuh sebagai ketentuan tidak tertulis sebagai pegangan hidup Baduy, sebagai tuntunan yang harus ditaati menjadi dasar bagi Puun dalam mengambil keputusan terhadap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy.

Ada sepuluh inti pikukuh yang hanya dapat ditafsirkan Puun. Puun dianggap sebagai penjelmaan dari buyut. Inilah dasar mengapa orang yang dapat menjadi Puun tidak untuk semua orang, melainkan berdasarkan keturunan darah. Saya kutipkan sepuluh pesan buyut sebagai berikut:

*buyut nu ditipkeun ka buyut
nagara satelung puluh telu
bangawan sawidak lima
pancar salawe nagara
gunung tidak boleh dilebur
lembah tak boleh dirusak*

*Larangan teu meunang dirobah
Buyut teu meunang dirobah
Lojor teu meunang dipotong
Pondok teu meunang disambung
Nu lain kudu dilainkeun
Nu ulah kudu diulahkeun
Nu enia kudu dienyakeun*

Pesan buyut ini diabadikan dalam sebuah tulisan, dipintu masuk Baduy melalui kampung Cijahe, sebagai peringatan bagi siapa saja yang hendak mengunjungi wilayah ulayat Baduy, agar menghormati nilai-nilai tradisional Baduy. Ungkapan 1 s/d 4 tidak diterjemahkan, dibiarkan dalam bahasa yang asli untuk menghindari kesalah-pahaman dengan orang Baduy. Istilah nagara pada ungkapan kalimat pada baris no. 2 dan 4 sampai sepuluh baris menurut saya adalah merupakan satu kesatuan. Larangan yang termaktub dalam sepuluh pesan buyut adalah untuk menjaga kebaikan dan kelestarian nagara. Sedangkan nagara bisa diartikan sebagai berikut:

1. Nagara/Negara, adalah sebuah wilayah yang luasnya meliputi seluruh Kecamatan Leuwidamar membentang ke Selatan memasuki kecamatan Maja sampai ke daerah pantai selatan. Keseluruhan wilayah tersebut ratusan tahun yang lalu, telah menjadi areal tanah huma bagi leluhur masyarakat Baduy dimasa lalu. Masyarakat Baduy dahulu memandang Baduy Dalam sebagai ibu kota Negara, karena disitu pimpinan tertinggi masyarakat Baduy dan benda benda suci sampai sekarang.
2. Nagara/Negara adalah wilayah Kesultanan Banten dimasa lampau, dimana wilayah Baduy termasuk didalamnya. Negara Republik Indonesia belum ada pada waktu itu. Akan tetapi kata nagara sekarang bisa juga diartikan negara Republik Indonesia, dimana Provinsi Banten adalah salah satu dari wilayah NKRI. Jika hal ini benar, maka pada hakekatnya orang Baduy merasa tidak pernah dijajah oleh bangsa asing (Belanda), karena konsep Negara orang Baduy lebih dahulu sudah ada dengan Negara Indonesia sekarang. Orang Baduy tetap hidup diwilayahnya dengan tenang,

larangan tak boleh dilanggar
buyut tidak boleh dirubah
panjang tak boleh dipotong
pendek tak boleh disambung
yang bukan ditiadakan
yang salah, salahkanlah
yang benar, benarkanlah

tidak pernah terlibat dalam pertentangan apapun dengan pihak manapun. Orang Baduy merdeka secara batiniah dan lahiriah sepanjang sejarahnya.

Pandangan kedua diatas, dapat dibuktikan dengan perilaku sosial dan politik orang Baduy terhadap pemerintah Indonesia yang dahulu (1945) dan sampai sekarang. Orang Baduy disetiap tahun menyatakan kebaktian dan dukungan yang mendalam atas keberadaan Negara yang melindungi tumpah darahnya. Upacara seba dengan mempersembahkan hasil tanaman seperti singkong, pisang, jengkol dan buah buahan yang lain, adalah pernyataan simbolis terhadap penghargaan, kesetiaan dan penghormatan masyarakat Baduy terhadap pemerintah dan Negara. Orang Baduy melakukan upacara seba, bukan karena takut akan tindakan diluar nilai-nilai Baduy yang dilakukan oleh pihak luar, akan tetapi kebaktian pada Negara menurut orang Baduy adalah bagian dari cara hidup yang dianut. Kemampuan orang Baduy untuk melakukan suatu tindakan politik seperti itu, dalam pelajaran hukum adat menurut Prof. Djojodiguno dikenal istilah "orang sudah mandiri", mampu secara sosial untuk melakukan tindakan atau sebagai subyek hukum. Istilah "kepurnaan jeneng" adalah orang yang dianggap cakap berbuat dan bertindak untuk dirinya atau kelompoknya.

Walaupun banyak orang berpendapat bahwa orang Baduy dimasukkan dalam kelompok masyarakat terasing, akan tetapi kemandiriannya untuk menentukan sikap hidupnya termasuk dibidang politik praktis, sangat berbeda dengan suku-suku bangsa kita di tempat lain seperti di Irian (Papua sekarang), suku anak dalam atau orang rimba di Jambi. Suku-suku bangsa yang sangat terbuka dan sudah maju pendidikannya

disebagian Irian memang belum sepenuhnya mandiri secara individu khususnya dibidang politik, masih sangat tergantung pada kepala suku. Sebaliknya orang Baduy mengenal milik komunal tetapi juga menghargai milik pribadi, juga tercermin pada sikap mereka dalam pemilihan umum disetiap lima tahun di Negara ini.

PEMILIHAN UMUM

Sebelum reformasi politik di Indonesia (1998), pada tahun 1973, pemerintah melakukan fungsi beberapa partai menjadi tiga saja. Empat partai Islam (NU, PSII, PARMUSI, PERTI) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), empat partai non Islam yakni Partai Nasional Indonesia, Partai IPKI, Partai Murba, Partai Kristen berubah menjadi Paratai PDI. Kelompok diluar kedua partai itu tetap menjadi Golongan Karya (bukan partai GOLKAR sekarang). Tujuan pemerintah orde baru pada saat itu untuk prnyederhanaan agar mudah diorganisir di parlemen. Hal itu dapat dibuktikan selama dua puluh lima puluh tahun sejak 1973-1998 yang lalu. Di era 1966-1998, dua partai (PPP dan PDI) memperoleh suara dalam setiap pemilihan umum tidak pernah melampaui 30% sedangkan Golongan Karya berkisar antara 70% sampai 74% suara di DPR. Selama masa orde baru PPP dan PDI terus terpecah belah yang menyebabkan kedua partai tersebut semakin lemah. Setiap partai terpecah, selalu ada faksi yan g mendekati pemerintah dan kelompok tersebut diakui sebagai pengurus yang sah dan mendapat proteksi dan pengakuan dari pemerintah pada waktu itu. Bandingkan dengan perpecahan partai dijamin pemerintahan Jokowi, hampir mirip dengan yang terjadi di jaman Orde Baru. Ambil contoh perpecahan PPP, perpecahan GOLKAR, PKPI, Hanura, dan lainnya. Kalau benar seperti itu maka pemerintahan Jokowi juga belajar dari sejarah masa lalu yang pernah menimpa parati PDI antara Megawati dan Suriadi pada masa itu.

Di masa orde baru, memang ada partisipasi politik orang Kanekes, tetapi sangat kecil. Orang Kanekes menganggap GOLKAR (tidak pakai partai), adalah partai pemerintah,

karena itu pilihannya hanya pada Golongan Karya saja (Ada hubungannya dengan calon dari asal orang Baduy Islam dari Partai Golkar, akan diuraikan dibelakang). Suasana reformasi dengan banyak partai membawa perubahan juga pada cara pandang politik orang Baduy, terlihat dari hasil pemilihan dengan perbandingan dua kali pemilihan umum legislative yang akan diuraikan dibawah ini.

PEMILU 2009

Pemilihan umum 1999 adalah pemilihan pertama setelah era reformasi 1998. Memang pada tahun 1997 sudah dilakukan pemilihan umum yang diikuti tiga kelompok politik yakni Golkar, PPP dan PDI. Presiden Habibie sebagai pengganti Soeharto melakukan pembaharuan sistim politik di Indonesia dengan memberi kebebasan kepada warga masyarakat untuk mendirikan partai partai baru. Pada 1999 diadakan pemilihan umum yang diikuti oleh 48 partai termasuk tiga partai sebelumnya, dimana pada tahun 2009 GOLKAR berubah menjadi Partai Golkar. Selain kebebasan mendirikan partai, Habibie melakukan banyak sekali perubahan dalam sistim ketatanegaraan kita termasuk melakukan beberapa kali amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945

Dalam pergolakan politik di Indonesia, masyarakat Baduy pada dasarnya tidak ikut secara langsung seperti menjadi aktifis partai politik, atau mencalonkan dirinya menjadi anggauta legislative. Mereka tetap dalam posisi semula, sebagai warga negara yang patuh pada nagara atau pamarentah saja. Untuk itu kita akan melihat partisipasi politik orang Baduy dalam pemilihan umum 2009 berikut ini (*Moh.Ali B.Dahlan, 2010*).

Pelaksanaan pemilihan umum di desa Kanekes, mengalami masalah kesulitan logistik, mengingat tidak ada transportasi yang diperbolehkan selain dengan berjalan kaki. Desa Kanekes dengan sekitar 55 buah kampung dengan sistim pemukiman terpencar juga dapat mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat menuju TPS. Selain itu, tidak ada penduduk setempat yang dapat ikut sebagai anggauta PPS atau saksi, mengingat bahwa masyarakatnya tidak dapat baca tulis, karena

tidak ada sekolah. Hal tersebut menyebabkan panitia pemilihan sebagian besar dilakukan oleh orang dari luar desa Kanekes. Jumlah penduduk desa Kanekes pada tahun 2009 ditaksir sekitar 10000 jiwa. Dari jumlah tersebut KPU Kabupaten Lebak menetapkan jumlah DPT sebanyak 6324 jiwa. Semula KPU menetapkan 17 buah TPS untuk seluruh wilayah desa Kanekes. Dengan alasan anggaran, logistik, dan terbatasnya personil penyelenggaraan, akhirnya 17 TPS disederhanakan lagi hanya menjadi dua buah saja, yakni di kampung Kaduketuk Gde yang lokasinya paling dekat dengan pusat transportasi umum, yakni kampung Cibuleger dalam wilayah desa Cisimeut, kecamatan Leuwidamar. Alasan lainnya karena semua petugas pelaksana pemilihan berasal dari luar desa Kanekes. Dari jumlah DPT sebanyak 6334 jiwa ternyata yang memberikan suaranya hanya 1362 orang atau sekitar 21,5 % dari semua yang terdapat. Perolehan suara dari calon calon partai dibagi di hampir setiap partai, akan tetapi 4 partai memperoleh suara terbesar dengan perincian masing masing sebagai berikut: Partai Demokrat dengan 324 suara, GOLKAR 300 suara, PPD 267 suara, PBR 253 suara. Sedangkan partai lainnya memperoleh suara yang jauh lebih kecil sebagai berikut Hanura; 12, Partai Pengusaha; 1, PKPB;13, PPRN;24, Gerindra; 21, Barnas;4, PKPI; 3, PKS;11, PAN;0, PMB;0, Partai Kedaulatan; 16, PKB;12, Partai Pemuda; 8, PNI; 54, PDP; 19, Partai Karya Perjuangan; 16, Partai Republik; 18, PPDI;2, Partai Pelopor;2, PPP;5, PDS;0, PBB;3, PDIP; 65, Partai Patriot;2, PKNU;2, Partai Merdeka;3, PNUI;1, PSI;13 dan Partai Buruh;0,.

Kecilnya jumlah penduduk yang memberikan suaranya secara praktis dapat dilihat dari jarak tempat tinggal yang jauh dan dipusatkannya dua buah TPS hanya disatu tempat saja, memberi petunjuk pada kita bahwa kesalahan terletak pada tingkat petugas PPS/KPU. Sedangkan masyarakat Baduy sendiri terkendala dengan jarak yang jauh, memerlukan beberapa jam untuk mencapai lokasi pemungutan suara. Sedangkan perolehan suara dibagi dua type, pertama empat partai memperoleh suara

paling besar, Type kedua dari perilaku pemilih, hampir setiap partai memperoleh suara walaupun sangat kecil. Pertanyaannya adalah mengapa orang Baduy memilih empat partai dengan suara terbesar dan mengapa orang Baduy memberikan suaranya kepada hampir semua partai? (KPU Lebak, 2004)

Untuk melihat tingkat kecerdasan orang Baduy dalam pemilihan umum, kita gunakan salah satu alat ukurnya dengan menggunakan jumlah suara tidak sah. Orang Baduy faktanya seratus persen tidak bersekolah (karena tafsir adat), artinya keseluruhan penduduknya tidak bisa baca tulis. Di desa Kanekes, dari 1363 yang menggunakan hak pilihnya terdapat 91 suara tidak sah atau 6,5%. Di desa Leuwidamar yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan, dari jumlah penduduk yang memberikan suara, terdapat sebanyak 2166 suara sah dan 105 suara tidak sah atau sebesar 4,6%. Di desa Wantisari dari jumlah 1941 orang yang memberikan suara, sebanyak 1582 suara sah dan 339 suara tidak sah, atau 17%. Desa Nayagati, dari jumlah pemilih sebanyak 2229 jiwa, terdapat sebanyak 2013 suara sah dan 216 suara tidak sah atau 9,2%. Dari gambaran tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kecerdasan politik dan pengetahuan umum lainnya dari orang Baduy menduduki nilai sedang atau lebih baik dari rata-rata desa di Kecamatan Leuwidamar.

PEMILU 2014

Dari 2009 sampai 2014 telah terjadi berbagai pergulatan politik di Indonesia khususnya dikalangan anggota parlemen dan partai politik. Pada tahun 1973 presiden Soeharto membuat keputusan yang disebut penyederhanaan. Memangkas jumlah partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat dari delapan partai menjadi hanya dua partai ditambah dengan Golongan Karya, yakni PPP (fungsi dari 4 partai Islam) dan PDI (fungsi dari 4 partai non Islam) Rupanya di era reformasi ini kaum politisi dan pemerintah merasa sangat lelah dengan jumlah partai yang terlalu banyak, maka dirancang suatu bentuk pembatasan partai di parlemen dengan menggunakan apa yang dinamakan parliamenmentary threshold dan cenderung

ingin terus ditingkatkan. Cara ini sesungguhnya bersumber dari spirit orde baru yang sayangnya dikuatkan dan dianut oleh MK. Tentu saja suasana kebatinan orang dari rezim lama juga ikut mempengaruhi cara pandang orang-orang MK yang tidak menggunakan nilai UUD 45 dalam suasana reformasi. Bagaimana logika berfikir seseorang yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat, karena jumlah perolehan suaranya tidak sesuai atau tidak sama besar dengan ketentuan parliamentary threshold, maka hasil pilihan rakyat tidak dianggap sah?. Kita tidak membahas masalah ini, tetapi inilah gejala politik yang terjadi selama kurun waktu 2009-2014. Sebagai akibat dari pergunakan tersebut maka terjadi penyusutan jumlah peserta KPU juga membuat berbagai aturan yang mempersulit partai ikut serta dalam Pemilihan Umum. Pemilihan Umum tahun 2009 dari 44 partai menyusut menjadi hanya 12 partai saja. Dari keduabelas partai tersebut beberapa diantaranya tidak duduk di parlemen karena tidak mendapat suara yang telah ditentukan persentasenya oleh Undang-Undang.

Teknis pelaksanaan Pemilihan pada tahun 2014 lebih baik dibandingkan pada tahun 2009. Jumlah TPS yang dahulu hanya dua buah kini menjadi 15 buah. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat semakin besar. Dari jumlah DPT di desa Kanekes sebanyak 7323, terdapat sebanyak 4569 jiwa yang memberikan hak suara atau 60 % meningkat dibanding Pemilu 2009 yang hanya 21,5% saja penduduk yang menggunakan hak pilihnya. Dari sejumlah 4569 yang menggunakan hak pilihnya, terdapat sebanyak 235 suara tidak sah atau sebanyak 5,1 %. Jika dibandingkan dengan suara tidak sah dalam Pemilihan 2009 sebanyak 6,5 % jumlah kedua pemilihan itu tidak jauh berbeda, bahkan menunjukkan kecenderungan semakin kecil suara tidak sah.

Secara umum, sikap pemilih masyarakat Baduy pada 2014 hampir sama dengan pemilihan 2009. Sikap demokratis yang berpandangan luas dan dalam, ditunjukkan oleh masyarakat Baduy dengan memberikan suaranya menurut keyakinannya. Hal ini sangat

luar biasa majunya jika dibandingkan dengan penduduk lain di Indonesia dengan pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat Baduy yang seluruhnya buta huruf. Pandangan tersebut semakin kuat, setelah memperhatikan suara signifikan pada seorang calon dari patai Golongan Karya yang tak lain adalah berasal dari kampung Baduy Islam di Leuwidamar yang bernama HK. Walaupun HK telah pindah ke luar Kanekes dan telah berpindah agama ke agama Islam, tetapi keterikatan kekerabatan tetap dipelihara dengan baik. HK juga membeli barang-barang hasil pertanian sesama buyut Baduy dan juga memiliki toko sembako yang terletak di Cibuleger, kampung bersebelahan dengan wilayah Kanekes. Hubungan kekerabatan ini member dukungn atas dasar harapan masyarakat Baduy terhadap kerabatnya bila menduduki jabatan politik di Negara ini. Model hubungan ini tidak atas loyalitas berdasarkan pemberian material apapun, tetapi dari segi praktisnya sesama masyarakat Baduy yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Model hubungan yang dibangun oleh masyarakat Baduy dibidang politik lebih bersifat praktis dan masuk akal sebagai ciri masyarakat maju.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dari semua suara yang telah ditetapkan oleh KPU, hampir semua partai memiliki pendukung dengan jumlah suara bervariasi sebagai berikut calon dari Partai Golkar dengan perolehan suara 2586, NASDEM 98, PKB 235, PKS 89, PDIP 389, Gerindra 955, Demokrat 300, PAN 35, PPP 24, Hanura 36, PBB 27, PKPI 9. Komposisi perolehan suara seperti diatas hampir menyerupai gambaran secara nasional, kecuali partai Golkar dengan calonnya yang berasal dari kerabat masyarakat Baduy.

Hampir semua politisi dari semua partai, mempunyai pandangan yang sama terhadap masyarakat Baduy. Mereka sangat irit menggunakan bahasa atau sangat jarang berbicara, lebih lebih dengan kaum politisi yang ke semuanya datang dari luar Baduy.

KESIMPULAN

Masyarakat Baduy di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Banten, sejak lama

membangun sistim pemerintahan sendiri dalam kerangka negara yang lebih luas diatasnya. Walaupun demikian, mereka tetap mematuhi nilai-nilai yang sudah ada dari buyut mereka.

Walaupun masyarakat Baduy belum mendapatkan pendidikan formal dari pemerintah, mereka belajar dengan caranya sendiri untuk dapat memahami perkembangan diluar desanya seperti penggunaan bahasa Indonesia dan pengenalan handphone secara terbatas. Proses perubahan itu berjalan lebih cepat setelah kawasan Baduy menjadi cagar budaya yang banyak dikunjungi turis asing dan domestik.

Masyarakat Baduy melihat segala aktifitas politik selama tidak menyentuh nilai nilai Baduy, dipandang sebagai bagian ketaatan kepada pemerintah yang menjadi bagian penting dari kehidupan tradisional Baduy.

Walaupun sudah terjadi berbagai perubahan dalam kaitannya dengan hubungan timbal balik antara masyarakat Baduy dan bukan Baduy, diharapkan pemerintah memberikan proteksi terhadap keberlangsungan ekonomi dan sosial masyarakat Baduy.

Pemerintah harus mengubah pandangan lama, yang menganggap orang Baduy sebagai suku terasing, dengan memberikan berbagai perlindungan terhadap hak ulayat dan hak politik masyarakat Baduy dengan menjauhkan diri dari menggunakan kebaikan Baduy untuk kepentingan politik dari golongan atau partai tertentu. Dalam konteks pikiran seperti itu, pemerintah harus memberikan bantuan ketrampilan dengan mengajak mereka menyusun rencana yang berasal dari gagasan dan nilai yang datang darikalangan mereka sendiri.

Walaupun jumlah penduduk Baduy tidak terlalu besar, akan tetapi sumbangannya dalam partisipasi politik di Indonesia, dapat dijadikan sebagai contoh khususnya dalam pengembangan suku suku bangsa yang masih terasing seperti di Jambi, Maluku maupun di Papua, serta daerah lain di Indonesia.

SUMBER RUJUKAN

Laporan KPU Kabupaten Lebak Provinsi Banten 2004.

Moh. Ali B. Dahlan, Peranan Pemerintah Dalam Memberdayakan Sistem Perdagangan Pada Masyarakat Baduy Di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Moh.Ali B.Dahlan. Partisipasi Politik Orang Baduy, Jakarta, 25 Oktober 2010,